



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Dalam konteks ini, kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai indikator kunci untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, masih banyak yang belum mengoptimalkan potensi sumber daya dan potensi keuangan secara maksimal. Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur fundamental bagi akuntabilitas publik dan kesuksesan penerapan teori keagenan (*agency theory*). Dalam relasi keagenan ini, pemerintah berperan sebagai *agen* yang memiliki kewajiban fidusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang bertindak sebagai *prinsipal*. Kinerja keuangan yang optimal tidak semata-mata dievaluasi dari kapasitas membangkitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kokoh, melainkan juga direfleksikan melalui efektivitas alokasi Belanja Modal sebagai instrumen investasi pembangunan berjangka panjang yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan esensial publik.

Menurut Juniarti yang ditulis pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, (2024) Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau pada periode 2022-2023 menunjukkan peningkatan nominal yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

signifikan pada variabel-variabel kunci, sebagaimana tercatat dalam data agregat Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 11,22%, sementara alokasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan sebesar 9,77%. Meskipun demikian, struktur keuangan daerah mengindikasikan suatu paradoks. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada pada rentang 24,1% hingga 26,7%, yang merefleksikan ketergantungan struktural yang tetap tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Sementara itu, porsi Belanja Modal yang cenderung statis sekitar 18% hingga 19% dari total belanja daerah mengisyaratkan potensi sub-optimalitas dalam komposisi anggaran untuk investasi publik jangka panjang.

Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Riau periode 2024 dan 2025 memperlihatkan dinamika yang bertolak belakang. Capaian surplus anggaran Rp139,43 miliar (Mediacenter Riau, 2025) justru disertai dengan tren kritis berupa penurunan drastis realisasi Belanja Modal sebesar 39,72%. Sementara dari sisi pendapatan, pertumbuhan PAD sebesar 38,08% belum menjadi penopang utama, mengingat penerimaan daerah masih sangat bergantung pada kenaikan ekstrem LLPDyS sebesar 1.099,09% di tengah melemahnya transfer. Kondisi ini mengindikasikan kerapuhan struktur keuangan daerah surplus yang terbentuk lebih merupakan hasil dari pemotongan belanja produktif dan komponen pendapatan yang bersifat sementara, bukan berasal dari fondasi fiskal yang kokoh dan berkelanjutan yang digerakkan oleh PAD.

Berdasarkan teori keagenan, isu pokok yang muncul adalah apakah pemerintah daerah, sebagai "agen" masyarakat, benar-benar menggunakan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

uang rakyat sesuai dengan kebutuhan jangka panjang rakyat itu sendiri. Data menunjukkan meskipun ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, sebagian besar anggaran masih dipakai untuk biaya operasional sehari-hari, sementara belanja untuk investasi penting seperti jalan dan sekolah proporsinya relatif kecil. Selain itu, ketergantungan pada uang dari pusat masih sangat besar. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan: kemungkinan anggaran lebih diarahkan untuk kepentingan jangka pendek pemerintah atau proyek politis, bukan untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan daerah, yaitu urgensi untuk menganalisis dan memperhatikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kapasitas keuangan daerah, yang tercermin dari kemampuan menggali sumber pendapatan internal dan efektivitas penyaluran anggaran untuk aset produktif, merupakan determinan kritis bagi keberlanjutan fiskal dan pencapaian target pembangunan wilayah. Oleh karena itu, optimasi kedua variabel tersebut menjadi imperatif dalam perumusan kebijakan daerah guna menciptakan kinerja keuangan daerah yang sehat, mandiri, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Seperti penelitian Hastuti & Nasution, (2024) Daerah yang menjadi fokus penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara, di mana kinerja keuangan pemerintah daerahnya menunjukkan ketidakefisienan. Hal ini disebabkan oleh perubahan dinamis dalam kondisi perekonomian, kebijakan fiskal, serta



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tuntutan masyarakat yang secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian Fernandes & Putri, (2022) Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat, yang juga mengalami dinamika serupa terkait pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan beberapa penelitian terkait, teridentifikasi bahwa sejumlah daerah masih menghadapi hambatan dalam aspek PAD dan belanja modal yang berdampak pada kinerja keuangan daerah. Beberapa faktor, seperti kapasitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kondisi geografis daerah, dapat menjadi penyebab utama dari hambatan tersebut.

Provinsi Riau dikenal memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. dengan wilayah yang terbagi dalam 10 kabupaten dan 2 kota, Riau diharapkan dapat memanfaatkan otonomi ini untuk menggali seluruh potensi daerah guna meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Fenomena saat ini yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu kemampuan yang kurang dalam menggali sumber potensi daerah sehingga kurangnya penyerapan pendapatan asli daerah. Hal ini meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam mengelola keuangannya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Suatu pemerintah daerah dikatakan efisien secara finansial apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Nilai rasio efisiensi yang semakin rendah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan yang cermat terhadap total biaya yang dikeluarkan dalam merealisasikan pendapatan, guna menilai efisiensi kegiatan pemungutan pendapatan yang dilakukan.

Tabel 1. 1
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Rasio Efisiensi periode 2021-2024

Tahun	Realisasi Total Belanja	Realisasi Total Pendapatan	Rasio Efisiensi
2021	8.931.704.166.450	9.383.001.507.905	95 %
2022	9.102.467.422.821,4	8.818.669.764.115,2	103 %
2023	9.867.684.585.857	9.184.418.138.301,7	107 %
2024	9.586.628.436.630,2	9.499.559.746.229,2	101 %

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data realisasi total belanja dan total pendapatan daerah selama periode 2021–2024, diketahui bahwa kinerja efisiensi keuangan pemerintah daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup berarti. Pada tahun 2021, rasio efisiensi tercatat sebesar 95,19%, di mana nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas 100% sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mencapai tingkat efisiensi yang baik. Hal ini berarti realisasi belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Namun pada tahun 2022 (103,22%), 2023 (107,44%), dan 2024 (100,92%) rasio berada di atas 100%, sehingga tergolong tidak efisien. Kecenderungan ini



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung merealisasikan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun.

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah menuntut optimalisasi penggalan sumber-sumber pembiayaan lokal, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan wilayah. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama pembiayaan belanja pemerintah daerah, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta jenis pendapatan asli lainnya. Berikut merupakan table fluktuasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.

Tabel 1. 2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Periode 2021-2024

Tahun	Realisasi PAD	Kenaikan/penurunan PAD
2021	4.050.468.561.143	-
2022	4.696.769.079.910,2	16%
2023	5.376.425.650.756,7	14%
2024	5.432.109.238.736,2	1%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD Provinsi Riau secara nominal terus bertambah sepanjang periode 2021–2024, laju pertumbuhannya justru mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 pertumbuhan mencapai 16%, kemudian turun menjadi 14% di tahun 2023, dan merosot sangat tajam hingga hanya 1% di tahun 2024. Perlambatan ini menjadi cermin lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD. Sementara itu, PAD merupakan sumber pendanaan utama bagi belanja daerah, termasuk belanja



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

modal. Jika pertumbuhan PAD terus melambat, maka kinerja keuangan daerah berpotensi terganggu.

Kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada PAD. Belanja daerah juga memberi pengaruh yang tidak kalah penting, mengingat belanja daerah terkait langsung dengan standar pelayanan publik bagi masyarakat. Lebih lanjut, belanja modal menjadi salah satu pos pengeluaran yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Berikut merupakan tabel Belanja Modal Provinsi Riau Periode 2021-2024.

Tabel 1. 3
Belanja Modal Provinsi Riau periode 2021-2024

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Kenaikan/penurunan Belanja Modal
2021	1.018.455.078.253	-
2022	1.508.534.414.100,6	48%
2023	2.009.492.924.307	33%
2024	1.887.693.923.021,9	-6%

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Mengacu pada Tabel 1.3, realisasi belanja modal Provinsi Riau menunjukkan lonjakan signifikan pada dua tahun berturut-turut, yaitu 48% (2022) dan 33% (2023), sebelum akhirnya mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2024. Periode penurunan belanja modal ini bertepatan dengan kondisi perlambatan pertumbuhan PAD yang hanya tercatat 1% di tahun 2024. Pola ini memberikan indikasi bahwa terbatasnya peningkatan PAD kemungkinan besar berkontribusi terhadap pengurangan belanja modal. Padahal, pengurangan belanja modal dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian mengenai pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024 perlu dilakukan secara empiris.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut penelitian (Natalia & Suprpto, 2023) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), salah satu komponennya terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan Belanja Daerah. Dalam struktur APBD, belanja daerah memiliki peran vital dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kontribusi signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan menjadi dasar penetapan variabel dalam penelitian ini, dimana kedua komponen tersebut cukup berperan sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti & Nasution, 2024) mereka berpendapat PAD yang tinggi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pengeluaran sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mendukung efisiensi keuangan. Adapun penelitian Yuliawati et al., (2024) menemukan bahwa PAD merupakan faktor kunci yang mendorong dalam peningkatan keuangan pemerintah daerah dan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah. Penelitian Marizka, (2024) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan target PAD-nya,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahkan jika melebihi target, tidak secara otomatis menjamin efisiensi dan kinerja keuangan daerah yang lebih baik.

Selain PAD, adapun belanja daerah yang juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana belanja daerah juga dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik daerah yang harus dipersiapkan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan daerah dan memberi manfaat jangka panjang (Natalia & Suprpto, 2023). Belanja Modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan dan sebagainya (Fernandes & Putri, 2022). Dengan demikian, pengeluaran belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk aset permanen atau jangka panjang yang bertujuan untuk mendukung sarana dan prasarana dalam pelayanan masyarakat. Belanja modal adalah jenis pengeluaran yang berfungsi untuk memperbaiki kekayaan daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, besarnya biaya belanja modal sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan masyarakat atau publik.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting, sehingga masyarakat dapat berkontribusi yaitu dengan membayar pajak yang juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian (Pratama et al., 2024) belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja modal. Sedangkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian (Fernandes & Putri, 2022) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas, peneliti menilai terdapat urgensi penulisan yang memiliki tujuan akhir yaitu untuk mengetahui apakah permasalahan dari Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal berpengaruh bagi Kinerja Keuangan Daerah. Meskipun telah ada penelitian yang membahas variabel yang sama, terdapat kesenjangan penelitian lokasi yaitu Provinsi Riau dan periode yang panjang selama empat tahun dari 2021-2024 sehingga perlu di teliti lebih lanjut. Serta penulis menawarkan kebaruan dari penelitian ini dimana peneliti menggunakan sumber data Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data terkini.

Berdasarkan uraian masalah yang ada dan berbagai ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ini melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Bagaimana Belanja Modal Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024?
- c. Bagaimana pendapatan asli daerah dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis apakah pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.
- b. Untuk menganalisis apakah belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.
- c. Untuk Menganalisis Apakah Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang keuangan, terutama dalam kinerja keuangan daerah. Serta penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang kajian dan penelitian lebih lanjut dengan objek dan ruang lingkup yang lebih luas.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Pemerintah.

Juga penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi serta acuan dalam mempertimbangkan pelaksanaan efisiensi kinerja keuangan daerah terkhusus pada Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga dapat mempunyai dampak yang signifikan bagi keuangan daerah serta masyarakat.

c. Bagi Peneliti.

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan ataupun manajemen keuangan sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dibuat dalam penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bagian bab ini menjelaskan berupa telaah pustaka seperti telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan variabel yang akan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, prosedur teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang diuraikan dalam bentuk gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat yang berhubungan dengan penulisan yang ada guna perbaikan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

